

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori utama di balik penelitian ini adalah teori *p stewardship*, yang merupakan bagian dari teori agensi yang lebih luas yang diusulkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori penatalayanan menjelaskan situasi di mana manajemen mengutamakan kepentingan kelompok daripada target individu. Teori ini berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara keberhasilan dan kepuasan organisasi secara keseluruhan. Menurut teori ini, kesuksesan dan kepuasan organisasi sangat terkait satu sama lain. Memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh direksi dan tim manajemen adalah bukti kesuksesan organisasi.

Pada akhirnya, keuntungan individu lebih besar daripada keuntungan kelompok. Organisasi sektor publik, seperti pemerintah, dapat diterapkan teori manajemen (Lestari & Dewi, 2020; Pattasina et al., 2020; Lumintang et al., 2021) dan organisasi nirlaba lainnya (Febriani, 2022; Witono & Widodo, 2023; Wulandari et al., 2023), yang telah didirikan sejak sektor akuntansi untuk memenuhi permintaan informasi pengawas dan manajer. Seiring dengan munculnya spesialisasi akuntansi dan munculnya organisasi sektor publik, akuntansi sebagai elemen yang menggerakkan transaksi menjadi semakin kompleks. Dengan bertambahnya tanggung jawab yang ditanggung oleh organisasi sektor publik, kondisi menjadi semakin kompleks, yang membuat tugas administratif yang ditugaskan sendiri menjadi semakin sulit bagi direktur. Semakin jelas bahwa fungsi manajemen dan kepemilikan berbeda. Pemilik sumber daya, seperti pengelola atau penyedia modal, sering mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada pihak lain, seperti manajemen atau wali, yang lebih berpengalaman dan siap. Karena hubungan kontraktual antara wali amanat dan prinsipal (amanah, kepercayaan) bertindak secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, *stewardship theory* adalah model yang tepat untuk organisasi sektor publik. Menurut implikasi teori

keperawatan dalam penelitian ini, pemerintah daerah merupakan entitas yang dapat dipercaya untuk kepentingan publik karena menjalankan tugas dan komitmennya dengan baik dan menawarkan akuntabilitas keuangan untuk memastikan tujuan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk memenuhi tugas tersebut, fidusia (manajemen dan auditor internal) meningkatkan pengendalian internal dan membuat laporan data keuangan yang baik.

1. Kualitas Laporan Keuangan

Semua transaksi, dari pencatatan hingga penyusunan ringkasan dan pembukuan, digambarkan dalam laporan keuangan, yang mencakup informasi lengkap tentang keadaan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan yang baik, diperlukan karyawan yang mahir dalam akuntansi keuangan dan memahami standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP, jika tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Keteraturan, kepatuhan pada hukum, efektivitas, efisiensi, ekonomi, transparan, dan tanggung jawab adalah prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kelayakan, dan keuntungan bagi masyarakat. Keteraturan melibatkan pengelolaan yang tepat waktu dan sesuai dengan bukti administrasi yang dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang patuh pada peraturan perundang-undangan dan bekerja efektif dan efisien akan memberikan laporan yang akurat dan memenuhi ketentuan yang didukung oleh bukti.

Keuangan daerah terdiri dari semua hak dan tanggung jawab daerah yang memiliki nilai moneter, termasuk semua jenis kekayaan yang terkait dengan tanggung jawab tersebut (UU No. 17, 2003). Setiap kepala daerah harus mematuhi pedoman yang telah

ditetapkan untuk mengelola aspek keuangan pemerintahan daerah. Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendorong tindakan proaktif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Akun keuangan pemerintah harus dibuat dengan cepat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dibuat. Laporan keuangan kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diserahkan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum.

2. Kompetensi SDM

Informasi keuangan merupakan produk yang berasal dari domain atau ilmu akuntansi (Ariyanto, 2020; Siagian & Indra, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Indriasari (2011) mengemukakan bukti empiris bahwa kemampuan SDM berdampak positif terhadap hubungan dan keandalan terhadap informasi setiap laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemampuan individu, kelompok, atau sistem untuk melakukan tugas mereka atau menggunakan wewenang mereka dengan cara yang memajukan tujuan secara efisien dan efektif disebut sebagai kemampuan SDM. Yang terbaik adalah memikirkan kapasitas sebagai kemampuan untuk memperoleh output, memenuhi harapan, dan melaksanakan sebagaimana dimaksud. Salah satu komponen penting dari penyebaran sistem yang

mempengaruhi kaliber data akuntansi adalah hubungan antara SDM dan sistem (Zahran & Ali, 2020). Berdasarkan Philadelphia et al. (2020), Lamuda (2018), dan Abdullah & Rafid (2017), variabel berikut mengukur kompetensi SDM: (1) pemahaman aturan dan standar; (2) interaksi dengan sistem; (3) kontrol atas SDM; dan (4) pendidikan dan pelatihan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemahaman aturan dan standar; interaksi dengan sistem; kontrol SDM; dan pendidikan dan pelatihan adalah metrik kompetensi SDM. Laporan keuangan pemerintah lebih akurat dengan teknologi informasi karena mereka mengurangi kesalahan dalam pengumpulan dan penyampaian data. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriana et al. (2019), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Fitriana & Handayani (2023), Sari dan Witono (2014), Ariesta (2013), dan Sembiring (2013), penggunaan teknologi informasi (PTI) memengaruhi kepercayaan laporan keuangan secara signifikan. Oleh karena itu, korelasi ini diusulkan sebagai hipotesis.

Teknologi informasi membantu pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan penyusunan laporan keuangan lebih cepat dan sesuai jadwal. Selain itu, teknologi ini meningkatkan laporan keuangan dalam beberapa cara. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan mengatur cara pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 menetapkan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan penyediaan informasi keuangan.

4. Sistem Pengendalian Internal

Salah satu faktor lainnya yaitu sistem pengendalian Internal dalam memastikan bahwa setiap divisi untuk membuat laporan internal memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda dengan memantau tugas dan operasi masing-masing divisi. Kualitas laporan keuangan yang dibuat dipengaruhi secara signifikan oleh struktur ini. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga meningkat ketika sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik (Dewi, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, audit, pemantauan, evaluasi, review, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh organisasi bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam konteks tata kelola yang baik, yang dikenal sebagai Pengawasan Internal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga menekankan bahwa proses yang sangat penting dan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendorong upaya nyata menuju transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan harus segera dibuat dan disusun sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintah yang

berlaku umum. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur pembuatan laporan ini. Sebelum disebarluaskan kepada publik dan DPR/DPRD, laporan akan diaudit oleh BPK. Laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Erna, E Journal of Accounting and Finance (JAF) , 3(1), 16-32.	Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Variabel X: Sistem Pengendalian Internal (X1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3)	Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM (Z) tidak memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Fibriyani et al., Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 2 (1) 2021; 11-16	Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Variabel X: Pemahaman akuntansi	Pemahaman akuntansi meningkatkan kualitas laporan keuangan
3	Yenni et al., Research In Accounting Journal Vol 1(1) 2020 : 64-88	Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Variabel X: Pemahaman akuntansi	Pemahaman akuntansi meningkatkan kualitas laporan keuangan
4	Utami et al., Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1 (3)	(3) 2020; 42-47 Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Variabel X:	Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan

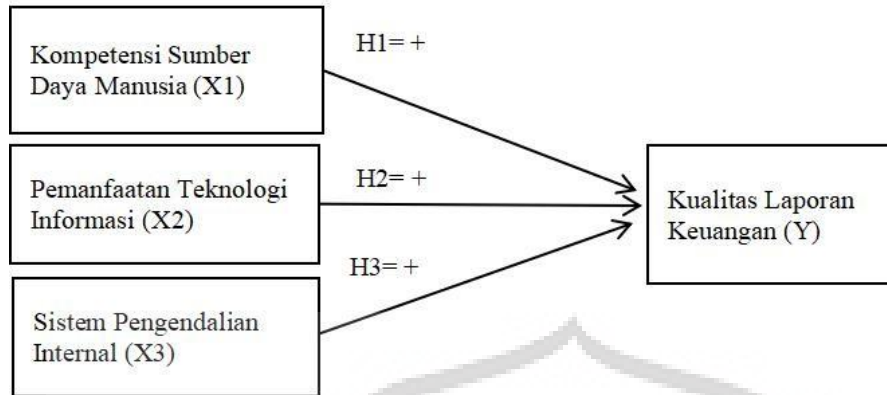
2020; 42-47 Pengendalian internal

- 5 Rohmah et al.,
E-JRA Vol. 09
No. 05 Agustus
2020
- Variabel Y: Kualitas
Laporan Keuangan
Variabel X:
Pemahaman akuntansi
- Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan
- 6 Gushenrinsya dan
Samukri.
JURNAL
AKUNTANSI,
Vol. 9, No. 1,
April (2020)
- Variabel Y: Kualitas
Laporan Keuangan
Variabel X: Sistem
informasi akuntansi
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.
- 7 Triono dan Dewi,
2020 Jurnal
Akuntansi dan
Pajak, 21 (1),
2020, 213-220
- Variabel Y: Kualitas
Laporan Keuangan
Variabel X:
Pengendalian Intern dan
informasi
- Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas dan Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 8 Lestari & Dewi,
2020 Jurnal
KRISNA:
Kumpulan Riset
Akuntansi; Vol.
11, No. 2 Januari
2020, pp. 170-
178
- Variabel Y: Kualitas
Laporan Keuangan
Variabel X: pemahaman
akuntansi, pemanfaatan
sistem informasi
akuntansi, dan sistem
pengendalian intern
- Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi, sistem pengendalian intern, dan penggunaan sistem informasi akuntansi.
- 9 Mardani dan
Suhartono. Jurnal
Ilmu Manajemen
dan Akuntansi
Terapan (JIMAT)
Vol. 10 No.2
November 2019
- Variabel Y: Kualitas
Laporan Keuangan
Variabel X: Sistem
Pengendalian Internal
- Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal.

- 10 Napisah dan Rakhmadani. Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 13 No 1 Februari 2019
- Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan
Variabel X: Pemahaman akuntansi
- Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan
- 11 Nugroho dan Setyawati. ECONBANK : Journal of Economics dan Banking Volume 1 no.2 Oktober 2019
- Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan
Variabel X : Sistem Informasi Akuntansi
- Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- 12 Ikyarti dan Aprila. Jurnal Akuntansi Vol. 9, No.2 2019
- Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan
Variabel X: Pengendalian Internal
- Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan
- 13 Rizka S, A., Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 6(3), 136-148.
- Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan
Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal
- Kesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sementara Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, kesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia.

C. Kerangka Pemikiran

Secara empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Fokusnya yaitu untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan sebagai variabel yang tergantung, sementara variabel independennya melibatkan pemahaman tentang prinsip akuntansi, seluruh sistem akuntansi, serta salah satu faktor lain yaitu pengendalian internal. Kualitas laporan keuangan memiliki hubungan dengan kejelasan informasi yang dapat disajikan dalam dokumen-dokumen tersebut untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif, maka laporannya harus disediakan secara transparan dan adil. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang tinggi, diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Pemahaman akuntansi akan meningkatkan pemahaman pengelola sistem keuangan tentang proses dan pencatatan akuntansi. Selain itu, penggunaan sistem teknologi akuntansi yang terintegrasi akan mempercepat pengelolaan data keuangan dan penyusunan laporan, serta mengurangi kesalahan dalam proses pelaporan sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai, risiko kesalahan perhitungan atau pencatatan dapat diminimalisir, sehingga mencegah kegagalan dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk mempermudah pemahaman, model penelitian ditampilkan dalam gambar.



Gambar 1. Model Penelitian

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh positif kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa faktor dapat menyebabkan laporan keuangan yang buruk; ini termasuk orang yang menyusun laporan tidak memahami akuntansi, tidak menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan benar, atau audit internal tidak berfungsi dengan baik. Adhillah (2022) menemukan bahwa kemampuan tenaga kerja memengaruhi kualitas laporan. Menurut penelitian lain, seperti yang ditunjukkan oleh Fibriyani et al. (2021), Rohmah et al. (2020), Tenni et al. (2020), dan Napisah dan Rakhmandani (2019), pemahaman akuntansi berkontribusi pada kualitas laporan keuangan.

H1 : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2. Pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi informasi (TI) mencakup semua teknologi yang memungkinkan orang berkomunikasi, menyimpan, mengubah, mengambil, dan memperluas informasi (Arad et

al., 2009). TI juga mencakup teknologi pemrosesan dan penyimpanan data, serta teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komponen TI ini secara langsung membantu menyusun database SKPD yang baik. Menurut Gushenrinsya & Samukri (2020), Nurillah dan Muid (2014), Mahaputra (2014), Haza (2015), dan Roshanti et al. (2014), teknologi informasi sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Semakin banyak penggunaan TI, semakin baik laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan pemerintah daerah dan pengolahan data transaksi juga lebih cepat dengan bantuan teknologi informasi.

H2 : Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh positif sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan.

SPI diterapkan diseluruh lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penelitian yang sudah dilakukan Munaryadi, & Sulistiyo, (2022); dan Utami et al. (2020); menyatakan bahwa Sistem internal Pemerintah memiliki berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.